



PUTUSAN

Nomor 812 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ELMA alias LEPOH;**
Tempat lahir : Karang Gading;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 September 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pangkal Pasar Hilir Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak" yang diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elma alias Lepoh bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 812 K/PID.SUS/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elma alias Lepoh dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 853/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elma alias Lepoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar *Visum et Repertum* Nomor 446/PSC/VER/TU/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 11205091602100008, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 326/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 5 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 853/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 21 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Elma alias Lepoh tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 812 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/AKTA.PID/KS/2017/PN.STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 812 K/PID.SUS/2018



yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan Tunggal;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang hanya sekedar memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri menjadi 3 (tiga) bulan, tidak perlu membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan hanya dengan Dakwaan Tunggal. Demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dianggap terlalu berat mengingat Terdakwa dengan saksi korban masih tinggal bertetangga, oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yaitu sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 326/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 5 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 853/Pid.Sus/

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 812 K/PID.SUS/2018



2016/PN STB tanggal 21 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ELMA alias LEPOH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 326/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 5 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 853/Pid.Sus/ 2016/PN STB tanggal 21 Maret 2017 tersebut mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELMA alias LEPOH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018**, oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN**

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 812 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. EDDY ARMY, SH., MH.ttd

ttd

Dr.H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H. ANDI SAMSAN NGANRO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 812 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)